

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA BUPATI KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2017**

Gafisola Faishal Hanif, Puji Astuti

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

gafisola41462@gmail.com, pujiundip@gmail.com

ABSTRACT

Voter participation is an important aspect of supporting the successful implementation of general elections. Through the level of voter participation in the election, it can show how much the public's interest in the next government is running. The importance of voter participation in holding elections is often not in line with what is happening. Banjarnegara Regency is one of the districts that has a low level of increase in participation, only reaching 0,65% from the previous Pilkada. From these problems, two formulations of the problem were taken regarding how the strategy of the General Election Commission (KPU) in increasing the participation of community voters in the 2017 General Elections for the District Head of Banjarnegara Regency and why the voter turnout rate in Banjarnegara Regency still tends to be low in the 2017 regional election?

The purpose of this research is to analyze the strategy of the General Election Commission (KPU) in increasing the participation of community voters in the 2017 General Elections for the District Head of Banjarnegara Regency and the reasons why the voter turnout rate in Banjarnegara Regency still tends to be low in the 2017 regional elections. This research uses strategy theory from George G. Dess and Alex Miller as well as the theory of the concept of voter turnout. The method used is a qualitative descriptive research method, where data were obtained through interviews, observation, documentation and relevant sources such as journals and theories related to this research. The research was conducted at the Banjarnegara Regency KPU, the informants in this study were two members of the Banjarnegara Regency KPU for the 2012 – 2017 period and the 2018 – 2023 period. Data analysis using interactive data analysis through the stages of data reduction, data presentation and concluding the data.

The results of this study indicate that the strategy implemented by the KPU of Banjarnegara Regency is quite good, as evidenced by the use of various methods in socializing and making mascots and jingles. However, in some aspects the implementation is still not optimal, such as the less the not optimal use of women's

organizations based in village/urban village, lack of attention to voters with disabilities and the absence of policies made for voters who migrate. There are two main factors that influence the level of voter turnout in Banjarnegara Regency, (1) high numbers of migrants unable to return home on election day and (2) the low level of education of the people of Banjarnegara Regency.

Improvement is needed in optimizing the implementation of the Banjarnegara Regency KPU strategy, so that the target of voter participation can be achieved optimally. There are several recommendation for further research: (1) it is recommended that further research be conducted that focuses on the community's decision to attend or not attend the polling place and (2) the education factor needs to be further investigated regarding the relationship between education level and community participation level.

Keywords: voter participation, evaluation, strategy

PENDAHULUAN

Pada 15 Februari 2017, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap II digelar di berbagai daerah di Indonesia. Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu daerah yang ikut menggelar Pilkada serentak ini untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017-2022. Sekitar 69,75% dari 779.379 pemilih menggunakan hak pilihnya dengan total suara sebesar 544.860 terdiri dari 525.371 suara sah dan 19.597 suara tidak sah. Pasangan Budhi Sarwono dan H. Syamsudin unggul dengan perolehan suara sebesar 54,21%. Jumlah suara tersebut mengungguli dua pasangan calon lainnya yaitu pasangan Hadi Supeno dan Nur Heni serta pasangan Wahyu Kristanto dan Saeful Muzad.

Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 mencapai angka 69,75%. Namun, apabila dibandingkan dengan presentase partisipasi pemilih di Kabupaten Banjarnegara pada Pilkada tahun 2011 maka kenaikan tingkat partisipasi pemilih tidak mencapai angka satu persen hanya mencapai angka 0,69%. Padahal tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) kerap kali dianggap sebagai bentuk keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum secara umum.

Kenaikan tingkat partisipasi pemilih masyarakat yang rendah menjadi evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dikarenakan

Partisipasi pemilih berkaitan dengan kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Partisipasi pemilih menjadi salah satu faktor penting yang perlu terus ditingkatkan dalam setiap pelaksanaan pemerintahan termasuk Pemilu, selain itu partisipasi pemilih juga erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Hal ini dikarenakan kerangka hubungan antara partisipasi pemilih, demokrasi dan legitimasi sangat erat. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi pemilih sangat berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Oleh sebab itu partisipasi pemilih menjadi salah satu aspek penting dari tatanan negara demokrasi, sekaligus sebagai ciri khas adanya modernisasi politik.

Pentingnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu nyatanya sering tidak sejalan dengan yang terjadi dilapangan. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia kerap kali diwarnai dengan berbagai masalah partisipasi pemilih masyarakat khususnya pada tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan Pemilu (*voter turnout*). Secara umum

terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya terjadi karena kendala teknis atau pekerjaan sehingga membuat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena masalah administratif, sosialisasi atau aspek politik pemilih. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu inilah yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

Kenaikan partisipasi pemilih masyarakat yang cenderung rendah di Kabupaten Banjarnegara membuat KPU perlu mengkaji ulang strategi yang telah dijalankan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi pemilih di Kabupaten Banjarnegara nyatanya hanya naik sebesar kurang dari satu persen dari Pilkada sebelumnya menjadi 69,75%. Meskipun tingkat partisipasi politik di Kabupaten Banjarnegara telah mencapai angka 69,75%, hal ini dirasa masih kurang karena tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh KPU Pusat yaitu sebesar 77,5%.

Dengan demikian, strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih belum optimal sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan sumber relevan seperti jurnal dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian dilakukan di KPU Kabupaten Banjarnegara, dengan subyek utama terkait strategi KPU Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Bupati Tahun 2017. Narasumber dalam penelitian ini adalah 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Banjarnegara periode 2012-2017 dan 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Banjarnegara periode 2018-2023.

PEMBAHASAN

1. Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 KPU Kabupaten Banjarnegara menggunakan sosialisasi yang massif ke enam segmen pemilih sebagai strategi utama dan juga beberapa strategi khusus untuk memaksimalkan jumlah penggunaan suara yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Penerapan strategi-strategi tersebut direalisasikan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Penetapan Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Penetapan formulasi dan sasaran jangka Panjang merupakan langkah pertama dalam upaya pelaksanaan strategi. Dalam upaya memenuhi aspek-aspek penting formulasi dan sasaran, maka disusun Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Gugus Risdaryanto selaku Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara pada 31 Mei 2016. Melalui petunjuk teknis tersebut dapat terlihat kejelasan terkait tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran dari pelaksanaan sosialisasi

serta metode yang akan digunakan pada pelaksanaan sosialisasi. Tujuan KPU melaksanakan sosialisasi ini adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal pemilihan. Sedangkan terkait sasaran dari sosialisasi ini KPU menyasarkan pada segmen-segmen masyarakat serta daerah-daerah yang kesulitan akses informasi serta yang memiliki tingkat partisipasi rendah dari tahun-ketahunnya. Selain menetapkan tujuan dan sasaran KPU Kabupaten Banjarnegara juga menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi. Dalam hal ini sesuai dengan pedoman yang ada, KPU Kabupaten Banjarnegara menggunakan beberapa metode sosialisasi yaitu (1) Komunikasi tatap muka, (2) Komunikasi melalui media massa, (3) Mobilisasi sosial, (4) Bahan sosialisasi, (5) Media sosial, (6) Web dan (7) Media kreatif.

2. Pemilihan Kebijakan dan Tindakan

KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan sosialisasi tatap muka secara massif ke segmen-segmen masyarakat secara menyeluruh sebagai strategi utama.

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggunakan dua cara yaitu sosialisasi dengan anggaran dan tanpa anggaran. Sosialisasi dengan menggunakan anggaran lebih mengarah pada pelaksanaan event-event yang diadakan oleh KPU dengan mengundang berbagai segmen masyarakat dalam rangka memberikan informasi terkait Pilkada. Sedangkan sosialisasi tanpa anggaran dilakukan KPU dengan cara bekerjasama dengan badan *ad hoc* yang ada di berbagai tingkat untuk menyebarkan informasi terkait Pilkada dengan cara masuk ke acara-acara masyarakat. Selain itu berbagai strategi lain juga dilakukan oleh KPU untuk memaksimalkan partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2017 ini. Segmen-segmen masyarakat yang menjadi target utama KPU kabupaten Banjarnegara antara lain:

a. Segmen Pemilih Pemula dan Pemilih Muda

Pemilih pemula menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum merupakan mereka yang baru pertama kali memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah sehingga

mempunyai hak memilih dalam Pemilihan Umum. Sebagai pemilih pemula tentunya mereka belum memiliki pengalaman memilih pada Pemilu sebelumnya. Hal ini membuat kondisi pemilih pemula menjadi labil dan sangat mudah dipengaruhi oleh kalangan-kalangan politik. Padahal pemilih pemula merupakan indikator kualitas demokrasi secara substansial pada masa ini maupun pada masa yang akan datang. Dalam upaya memberikan informasi serta pendidikan terkait Pemilu dan Pilkada, KPU membuat program “*KPU Goes to School*” yang diselenggarakan hampir ke setiap SMA/MA/SMK yang ada di Kabupaten Banjarnegara, namun belum seluruhnya. Program ini menjadi salah satu strategi KPU Kabupaten Banjarnegara untuk menarik para pemilih pemula agar paham dan mau menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan Pemilu khususnya pada Pilkada Tahun 2017.

Sedikit berbeda dengan pemilih pemula, pemilih muda merupakan mereka yang setidaknya telah mencoblos satu kali pada pemilu sebelumnya. Segmen pemilih muda atau kerap disebut sebagai pemilih milenial merupakan pemilih yang memiliki rentang usia 17 - 37 tahun. Namun, dalam hal ini KPU Banjarnegara memfokuskan pemilih muda ini kepada para mahasiswa yang ada di Kabupaten Banjarnegara melalui program “*KPU Goes to Campus*”. Program ini dilaksanakan dengan mengunjungi kampus-kampus di Kabupaten Banjarnegara.

b. Segmen Pemilih Perempuan

Segmen pemilih perempuan kerap kali memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari pada pemilih laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan di Indonesia masih lebih unggul dibandingkan dengan pemilih laki-laki. Meskipun tingkat partisipasi perempuan sering kali lebih tinggi daripada tingkat partisipasi laki-laki, namun hal

itu dapat dikatakan belum cukup maksimal, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang melatarbelakangi hal tersebut. Perempuan dinilai masih sangat rentan terhadap perilaku *money politic* yang ada. Dalam upaya meningkatkan partisipasi serta pencerdasan terkait *money politic* kepada pemilih perempuan KPU Banjarnegara bekerjasama dengan LSM Kembang Emas menyelenggarakan Pendidikan Pemilih bagi kelompok perempuan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Pendidikan pemilih tersebut mengusung tema “Menuju Perempuan Cerdas dan Berdemokrasi” dan dihadiri berbagai kelompok perempuan di Kabupaten Banjarnegara. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya perwakilan Muslimat NU, Fatayat, Aisyiyah, Wanita Syarikta Islam, Koalisi Perempuan Indonesia, Women Crisis Center, Wanita Katolik Indonesia Cabang Banjarnegara, Bhayangkari, Persit Chandra

Kirana, Dharma Wanita Persatuan, Pengurus PKK Kabupaten Banjarnegara, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Acara ini menghadirkan beberapa pembicara antara lain Dosen Fisipol Unsoed Purwokerto Denok Kurniasih S.Sos, M.Si, wartawan Suara Merdeka M. Syarif SW, S.Sos dan anggota Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Banjarnegara Khuswatun Chasanah, S.Sos.

c. Segmen Pemilih Difabel

Penyandang disabilitas yang merupakan orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik tetap memiliki hak yang sama dalam segala bidang dan hak tersebut dilindungi oleh negara. Sesuai prinsip kewarnegaraan inklusif, maka penyandang disabilitas berhak memperoleh pemenuhan haknya sebagai warga negara secara adil tanpa memandang identitasnya. Pemenuhan hak-hak tersebut termasuk pada aspek politik, dimana KPU tidak hanya

menyediakan Pemilu yang aksesibel, namun juga bertanggung jawab untuk menyediakan literasi pemilih penyandang disabilitas tersebut. Dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih difabel, KPU Kabupaten Banjarnegara mengadakan sosialisasi langsung dengan cara mengadakan pertemuan bersama komunitas-komunitas penyandang disabilitas. Contohnya, sosialisasi dengan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) dan Perstuan Tuna Netra Banjarnegara (Putrabara).

d. Segmen Pemilih Komunitas dan Organisasi Masyarakat

Segmen pemilih komunitas dan Organisasi Masyarakat (ormas) dipilih menjadi salah satu target sosialisasi karena memiliki basis massa yang cukup banyak sehingga dinilai mampu menyebarkan informasi dengan lebih cepat. Metode yang digunakan dalam sosialisasi lebih mengarah pada simulasi sehingga mampu dipahami dengan lebih baik oleh anggota komunitas yang memiliki range usia beragam.

Sasaran dari sosialisasi ini adalah komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Banjarnegara, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Kelompok Karang Taruna, Kelompok PKK, Kelompok Arisan, Perkumpulan RT, Ikatan Pemuda NU (IPNU), LSM dan Kelompok Guru yang teragabung dalam MGMP PKn SMA dan SMK Se Kabupaten Banjarnegara.

e. Segmen Pemilih Masyarakat Agama

Segmen pemilih masyarakat agama dipilih karena pada dasarnya memiliki kesamaan dengan segmen pemilih komunitas yaitu memiliki basis massa yang cukup banyak. Selain itu mereka juga akan selalu hadir dan bertemu satu sama lain pada setiap moment acara keagamaan, sehingga nantinya informasi terkait Pilkada Bupati tahun 2017 dapat disebarluaskan ke masyarakat luas. Sasaran dari sosialisasi ini antara lain jamaah pengajian, organisasi keagamaan seperti NU (Nahdlatuh Ulama), Muhammadiyah dan JATMAN

(Jam'iyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an Nahdliyyah), jamaah ibu-ibu muslimat, jamaah tahlil, tokoh agama, ustadz atau ustadzah, guru dan pengurus TPQ serta kyai di pondok pesantren. Metode yang digunakan melalui dialog, ceramah serta tatap muka dengan memanfaatkan kegiatan keagamaan yang ada.

f. Segmen Pemilih Masyarakat Umum

Segmen pemilih masyarakat umum merupakan segmen pemilih dengan basis paling banyak. Segmen ini mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang sudah memiliki hak pilih baik di kota maupun hingga pelosok desa. Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tahapan serta informasi-informasi terkait Pilkada Bupati tahun 2017.

Metode yang digunakan untuk sosialisasi kepada segmen masyarakat umum cukup beragam. Selain menggunakan metode tatap muka, KPU juga bekerjasama dengan komunitas

serta media massa lokal yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sosialisasi tatap muka dilakukan dengan metode ceramah serta simulasi tata cara pencoblosan. Sosialisasi ini bekerjasama dengan badan *ad-hoc* di berbagai tingkat seperti PPK di tingkat Kecamatan dan PPS di tingkat Desa dengan cara masuk kedalam acara-acara rutin masyarakat.

Selain sosialisasi yang massif ke enam segmen masyarakat, KPU juga menggunakan tiga strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Banjarnegara. (1) Pemutakhiran data pemilih, hal ini merupakan salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Melalui pemutakhiran data pemilih ini nantinya daftar pemilih tetap akan di *cross check* agar menghasilkan data pemilih final. (2) Pembuatan maskot serta logo dari Pilkada Bupati Banjarnegara. Maskot yang dibuat oleh KPU saat itu berupa boneka dawet ayu yang merupakan minuman khas Kabupaten Banjarnegara dan

diberi nama “Sidayu” yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat Banjarnegara pada Pilkada Bupati tahun 2017 (3) Mengadakan lomba pembuatan jingle Pilkada 2017. Tujuan diadakannya lomba ini adalah untuk mengajak seniman-seniman di Kabupaten Banjarnegara untuk bisa menyalurkan minat dan bakatnya bersama dengan KPU untuk mensukseskan Pilkada Bupati Tahun 2017. Selain itu melalui media musik diharapkan nantinya informasi terkait Pilkada dapat lebih mudah diterima oleh semua kalangan.

3. Alokasi Sumber Daya

Pengalokasian sumber daya bertujuan untuk dapat mengetahui sumber daya yang ada dan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi, misi serta tujuan yang diharapkan. KPU Kabupaten Banjarnegara memaksimalkan pemanfaatan seluruh anggota dan pegawai di KPU Kabupaten Banjarnegara dalam setiap tahapan persiapan Pilkada Bupati Tahun 2017. Selain itu KPU juga bekerjasama dengan BAWASLU

serta badan *ad-hoc* yang terdiri dari teman-teman PPK dan PPS. Anggaran final bagi pelaksanaan Pilkada Bupati Tahun 2017 yang disahkan melalui penandatanganan Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900/448/Kesbangpollinmas/2016 dan Nomor 110/Kpu-Kab-012.329402/V/2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebesar Rp. 21.637.800.000,- (Dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Evaluasi Strategi

Pada implementasi strategi KPU, terdapat beberapa evaluasi yang ada: (1) Kurangnya pemanfaatan organisasi dan perkumpulan perempuan yang lebih luas seperti ibu-ibu pengajian, posyandu maupun perkumpulan perempuan tingkat desa. (2) Kurangnya pemenuhan sarana prasarana bagi pemilih difabel. (3) Kurangnya promosi terkait maskot dan jingle Pilkada

Tahun 2017 sehingga kuran diketahui masyarakat.

2. Tingkat Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) pada Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Partisipasi pemilih (*voter turnout*) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pesta demokrasi. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) menjadi fokus utama pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Voter turnout disini pada dasarnya merujuk pada sejauh mana pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan Pemilihan Umum. Melalui tingkat kehadiran pemilih pada hari pemilihan inilah nantinya akan diketahui tingkat presentase terkait partisipasi pemilih pada Pemilu.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 memang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Pada Pilkada Bupati Tahun 2011

tingkat partisipasi pemilih mencapai angka 69,06%. Sedangkan pada Pilkada Bupati Tahun 2017 tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai angka 69,75%. Memang terjadi kenaikan apabila kita bandingkan Pilkada Tahun 2017 dengan tahun 2011, namun kenaikan yang terjadi masih begitu rendah bahkan tidak mencapai angka satu persen yaitu hanya sebesar 0,69%.

Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tahun 2017. Faktor pertama yaitu terkait banyaknya masyarakat yang menjadi buruh dan bekerja diluar kota maupun luar negri dan tidak dapat pulang pada hari pemilihan. Hal ini membuat terciptanya sebuah fenomena golput semu. Faktor kedua adalah terkait rendahnya pendidikan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menciptakan sebuah pemikiran pragmatis terkait partisipasinya dalam pemilihan.

PENUTUP

SIMPULAN

1. Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Bupati Tahun 2017, KPU Kabupaten Banjarnegara menggunakan sosialisasi ke enam segmen masyarakat sebagai strategi utama. Ditambah dengan strategi pendukung seperti pemutakhiran data pemilih, serta pembuatan maskot dan jingle Pilkada. Namun, pada pelaksanaannya strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dinilai masih kurang maksimal. Terdapat beberapa evaluasi dari strategi yang dilaksanakan oleh KPU antara lain (1) Kurangnya pemanfaatan organisasi atau perkumpulan perempuan yang lebih luas sebagai sarana sosialisasi Pilkada dan anti *money politic* bagi segmen pemilih perempuan. (2) Segmen pemilih difabel yang membutuhkan perhatian lebih, terutama dari sisi dukungan keluarga/saudara serta sarana prasarana. Dan (3) Kurangnya promosi terkait maskot dan jingle

Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017.

2. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dipengaruhi oleh dua faktor utama. (1) Banyaknya masyarakat di usia produktif yang pergi merantau ke luar daerah/ luar negeri dan tidak bisa pulang saat hari pencoblosan. Meskipun DPT tinggi, tetapi angka partisipasi yang ada tidak bisa maksimal. (2) Faktor pendidikan yang rendah.

SARAN

1. Perlu adanya peningkatan dalam pengoptimalisasian pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Banjarnegara. Khususnya pada pemilihan metode yang digunakan untuk segmen pemilih pemula dan pemilih muda. Penggunaan metode dengan memanfaatkan media digital dan kreativitas seperti pemutaran film dinilai menjadi metode paling tepat untuk generasi muda, sehingga informasi yang diberikan akan lebih mudah diterima dan

dipahami oleh pemilih pemula dan pemilih muda. Selain itu KPU juga perlu menilik kembali kelengkapan fasilitas bagi pemilih disabilitas. Penempatan panitia TPS yang paham dan mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, khususnya penyandang tuna rungu dan tuna wicara juga perlu dipertimbangkan oleh KPU agar nantinya dapat meningkatkan kenyamanan dan percaya diri pemilih disabilitas untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

2. KPU perlu mengkaji penggunaan formulir pemindahan tempat memilih atau Formulir B5 bagi perantau yang tidak bisa pulang ke daerah asal pada saat pemilihan. Hal ini dikarenakan jumlah pemilih yang merantau dari Kabupaten Banjarnegara sangat amat banyak, sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu pencerdasan terkait pentingnya demokrasi dan dampak akibat

golput atau menerima bentuk *money politic* yang dijelaskan dalam bentuk sederhana harus digencarkan khususnya di daerah-daerah pelosok yang memiliki tingkat pendidikan dan partisipasi yang rendah

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nopi, Andi Mulyadi. 2019. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. *JOPPAS: Journal of Public and Administration Silampari*, 1(1)
- Gleko, Petrus, Agung Suprojo dan Asih Widi Lestari. 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6 (1)
- Liando, Daud M. 2016. Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten

Website

- KPU.go.id. 2017. *PILKADA KABUPATEN BANJARNEGARA*. Diakses pada 14 Oktober 2021 melalui https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_tengah/banjarnegara
- Harian Semarang. 2016. *Pilkada Banjarnegara 2017, KPU Bidik Pemilih Perempuan*. Dalam <https://hariansemarang.id/2016>

[/10/10/pilkada-banjarnegara-2017-kpu-bidik-pemilih-perempuan/?amp=1](#). Diunduh pada 30 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB

Dokumen

KPU Kabupaten Banjarnegara. 2017. Laporan Penyelenggaraan Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

